BAB V

CONCLUSION

Keinginan Indonesia untuk menjadi negara yang memiliki industri otomotif sendiri merupakan cita-cita Indonesia yang sangat diidamkan. Namun, Indonesia tidak dapat bersaing dengan produsen otomotif besar dunia yang telah berjalan dan bersaing di dunia otomotif internasional. Pencetusan pemerintah akan mobil pedesaan merupakan salah satu cara agar Indonesia dapat bersaing dengan produsen-produsen otomotif dunia dikarena mobil pedesaan dianggap sebagai mobil dengan spesifikasi yang baru dalam dunia otomotif serta sangat cocok dengan kondisi alam Indonesia.

Berdasarkan analisis penulis dengan menggunakan enam indikator dari konsep *developmental state* oleh Adrian Leftwich dalam menganalisis bagaimana dorongan kebijakan pemerintah dalam memberikan proteksi terhadap sektor industri mobil pedesaan dari kuatnya persaingan industri otomotif global pada masa Presiden Joko Widodo. Penulis mendapat temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut.

Pertama, terkait dengan indikator *determined developmental elite* yang melihat siapa saja aktor yang terlibat dalam pengembangan sektor industri otomotif mobil pedesaan. Aktor-aktor yang memiliki peran besar di dalam perumusan kebijakan ini antara lain Presiden Joko Widodo selaku Presiden Indonesia yang mendukung adanya mobil pedesaan, aktor selanjutnya yaitu Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian, kedua orang ini menjadi tokoh sentral dari perkembangan mobil pedesaan.

Kedua, terkait dengan faktor *relative autonomy of the developmental state* yang melihat kewenangan dan batasan dalam mengatur kebijakan terkait industri otomotif mobil pedesaan. Presiden Joko Widodo selaku pimpinan eksekutif memiliki otoritas untuk menentukan pengembangan industri yang dijadikan prioritas. Kementerian Perindustrian memiliki otoritas dalam mengarahkan sumber daya industri di dalam negeri untuk dialokasikan pada pengembangan sektor industri sesuai arahan Presiden seperti program pelatihan bagi SDM. Kementerian Keuangan yang berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan terkait pemberian insentif dan pajak yang rendah bagi produsen dan konsumen dari industri mobil pedesaan. Pemerintah dan elit-elitnya juga memiliki wewenang untuk memanfaatkan elemen-elemen yang terdapat dalam sektor industri termasuk pihak non-negara seperti IOI dan GAIKINDO.

Ketiga, terkait dengan faktor *a powerful, competent and insulated economic bureaucracy* yang melihat penunjukan badan-badan resmi yang mengatur birokrasi untuk membantu pengembangan kebijakan industri mobil pedesaan. Badan-badan yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo adalah Kementerian Perindustrian yang bertugas mengatur fokus industri nasional ke arah pengembangan mobil pedesaan, menentukan perusahaan-perusahaan yang mensuplai bahan baku mobil pedesaan tersebut yaitu PT.Krakatau Steel dan komponen-komponen dari para IKM yang digandeng oleh Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian juga menunjuk IOI selaku pihak yang bertugas dalam riset dan pengembangan purwarupa mobil pedesaan.

Kementerian Keuangan diberi tugas oleh Presiden Joko Widodo untuk membantu berjalannya kebijakan industri mobil pedesaan melalui sektor ekonomi dan pajak seperti pemberian insentif bagi produsen dan konsumen mobil pedesaan.

Faktor yang keempat yaitu *developmental states and civil society* yang melihat bahwa pembuatan kebijakan terkait pengembangan sektor industri otomotif mobil pedesaan tidak dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat namun lebih kepada NGO di Indonesia seperti GAIKINDO, IOI dan Astra. Kebijakan ini di ambil pemerintah setelah melihat gagalnya industri mobil nasional bersaing dengan industri mobil asing sehingga fokus kemudian dialihkan kepada mobil pedesaan yang memiliki potensi merebut pangsa pasar global sektor industri mobil pedesaan yang multiguna.

Faktor kelima yaitu terkait *the effective management of non-state economic interest*, yaitu mengenai adanya upaya penekanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang tidak memperhatikan kepentingan ekonomi dari aktor-aktor non-negara namun dalam jangka panjang memberikan keuntungan bagi pengembangan domestik. Kebijakan seperti Upaya transfer teknologi kepada IKM dari Astra sebagai industri otomotif yang telah lama berkecimpung dalam dunia industri Indonesia. Kebijakan lainnya yaitu upaya peningkatan TKDN melalui IKM-IKM di daerah, hingga kebijakan bantuan RnD pemerintah melalui IOI dalam mendorong pengembangan industri mobil pedesaan.

Faktor terakhir yaitu *repression, legitimacy and performance* yang mengakui adanya kebijakan represif yang dijalankan oleh pemerintah dalam mendorong pengembangan sektor industri mobil pedesaan. Dalam riset ini ditemukan meski

beberapa kebijakan yang sudah direalisasi seperti penunjukan langsung tanpa tender PT. Krakatau Steel sebagai pemasok baja. Namun, beberapa kebijakan masih sebatas wacana, seperti wacana penghilangan PPnBM bagi konsumen mobil pedesaan dan wacana penunjukan IKM-IKM sebagai pemasok komponen-komponen mobil pedesaan.

Berikut merupakan tabel yang menunjukan sudah sampai mana pemerintah mampu memenuhi kriteria yang sesuai dengan indikator dari teori *Developmental State* yang dikemukakan oleh Adrian Leftwich.

Menurut Adrian Leftwich	Yang telah dilakukan Indonesia
Determined Developmental Elite yang dimana menjelaskan bahwa harus ada ketertarikan dari elit pemerintah terkait kebijakan pengembangan nasional.	Sudah sesuai dengan indikator pertama, karena Presiden Joko Widodo beserta Menteri Perindustrian telah memiliki ketertarikan akan mobil nasional.
Relative Autonomy of the Developmental State yang menjelaskan bahwa negara harus mengesampingkan keinginan beberapa pihak yang sekiranya tidak diuntungkan agar dapat mencapai tujuannya.	Sudah sesuai dengan indikator kedua, karena pemerintah memulai semuanya karena keinginan untuk mencapai kepentingan nasional dan mengesampingkan keinginan para pelaku industri-industri terkait otomotif diluar yang dilibatkan oleh pemerintah pada industri mobil pedesaan.

A Powerful, Competent, and Insulated Economic Bureaucracy yang menjelaskan bahwa dibutuhkan strategi yang matang apabila ingin mencapai keuntungan ekonomi dalam jangka panjang.	Sudah sesuai dengan indikator ketiga, karena wacana kebijakan yang diambil oleh pihak yang dilibatkan terkait pengembangan mobil pedesaan itu sesuai dengan tujuan awal Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar industri mobil pedesaan bisa memberikan keuntungan ekonomi dalam jangka panjang kepada masyarakat dan negara
Developmental States and Civil Society yang seringkali kebijakan diambil bersifat *top-down* atau masyarakat tidak turut andil dalam perumusan kebijakan.	Sudah sesuai dengan indikator keempat yang dimana pemerintah mengambil kebijakan secara mandiri karena inisiatif untuk memajukan kepentingan nasional, bukan karena adanya dorongan atau keinginan yang langsung disampaikan dari masyarakat ke pemerintah.
The Effective Management of Non-State Economic Interest yang menjelaskan adanya upaya penekanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang tidak memperhatikan kepentingan ekonomi dari aktor-aktor non-negara.	Sudah sesuai dengan indikator kelima karena adanya penunjukan secara langsung IKM-IKM yang telah ditentukan oleh Kementerian Perindustrian yang akan melaksanakan pengembangan mobil pedesaan yang

	membuat beberapa IKM yang tidak terpilih tidak mendapat kesempatan tersebut.
Repression, Legitimacy, and Performance, yaitu mengakui adanya kebijakan represif yang dijalankan oleh pemerintah di dalam mendorong pengembangan sektor perekonomian yang ingin ditingkatkan, mampu berjalan dan menunjukkan legitimasi atas kebijakan yang dijalankan tersebut dan pada akhirnya memperlihatkan performa yang dapat dinilai baik secara kualitas dan kuantitas.	Tidak sesuai dengan indikator keenam karena belum adanya tindakan lebih lanjut dari pemerintah. Penulis menemukan bahwa pada indikator ini masih terbatas pada sikap represif saja yang tampak, namun belum ada tindakan lebih lanjut yang memperlihatkan legitimasi dan performa yang terlihat secara nyata atas kebijakan industri mobil pedesaan.

Dari temuan-temuan diatas, dapat disimpulkan bahwa selama ini belum ada tindakan represif yang dilakukan pemerintah selain sebatas wacana. Terutama terkait kebijakan yang dikhususkan untuk pertumbuhan AMMDes, sehingga performa kebijakan dan legitimasinya masih dianggap nol atau tidak ada. Karena dapat disimpulkan pada saat ini, muncul dan berkembangnya mobil pedesaan di Indonesia itu lebih kepada dilakukan oleh perusahaan swasta secara mandiri, dan hal ini didorong oleh permintaan pasar bukan karena dorongan pemerintah melalui kebijakan represif.